



Kesalahan Masih Berulang

HASIL PEMERIKSAAN BPK

JAKARTA, KOMPAS — Kesalahan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dinilai berulang di tahun 2014. Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini yang sama, yakni wajar dengan pengecualian.

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soeja Djanegara, pada rapat paripurna istimewa penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7), mengatakan, beberapa kekurangan yang terjadi tahun 2013 berulang, antara lain sensus aset yang kurang tertib dan tidak menyeluruh, serta pencatatan realisasi belanja yang tidak didukung bukti lengkap.

Pada pengelolaan keuangan tahun 2014, BPK menemukan masalah serupa. Namun, ada persoalan lain yang ditemukan tahun lalu, antara lain terkait program kemitraan dengan pihak ketiga yang pencatatannya tidak disertakan dokumen sumber. Kondisi itu berisiko terhadap keamanan aset pemerintah daerah.

"Pada tahun 2014, BPK masih menemukan catatan-catatan itu belum tuntas. Pengecualian dalam opini tahun 2013 masih ber-

ulang," kata Moermahadi.

Selain itu, ada persoalan pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak bisa ditelusuri rinciannya. BPK juga mencatat kelemahan sistem belanja modal atas paket pengadaan barang dan jasa sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 214,29 miliar.

BPK juga menyoroti pembelian bidang tanah di Jakarta Barat. Prosesnya tidak melalui proses pengadaan yang memadai sehingga menimbulkan risiko kemahalan. Selain itu, auditor juga memberikan perhatian pada penyertaan modal dan aset daerah ke badan usaha milik daerah PT Transjakarta yang dinilai tidak sesuai ketentuan, antara lain tanah seluas 794.830 meter persegi dan tiga blok apartemen.

Fakta lain yang diminta BPK untuk segera ditindaklanjuti adalah penanggulangan kerusakan jalan pada suku dinas pekerjaan umum sehingga berpotensi kelebihan pembayaran Rp 1,84 miliar. Ada pula potensi kelebihan pembayar premi asuransi kesehatan Rp 3,7 miliar, serta pengeluaran bantuan operasional pendidikan yang tidak tertib dan tidak dipertanggungjawabkan se-

besar Rp 3,05 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak puas dengan penilaian itu. Dia berharap, dengan sejumlah pembenahan kelak pengelolaan keuangan DKI Jakarta mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.

Basuki membenarkan adanya persoalan pengelolaan aset daerah. Dia mengakui banyaknya aset yang hilang karena perjanjian kerja sama antara pemerintah terdahulu dan pihak ketiga yang memberatkan posisi Pemprov DKI. Dia berharap BPK dapat mengeluarkan rekomendasi agar Pemprov DKI lebih kuat di pengadilan untuk pemutusan kerja sama atau negosiasi ulang atas pengelolaan aset.

Dalam hal pengelolaan uang, menurut Basuki, sistem yang diterapkan tahun ini lebih baik. Satuan kerja perangkat daerah tidak lagi bisa memainkan anggaran dengan pertanggungjawaban seadanya.

"Kami tarik dua pegawai BPK masuk jadi PNS (pegawai negeri sipil) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DKI). Mereka membantu pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ada," kata Basuki. (MKN)